



Daftar Isi

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
INTISARI	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian	8



BAB II TINJAUAN PUSTAKA 14

A. Kedudukan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sebelum Perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945	14
B. Kedudukan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945	20
C. Hierarki Norma Hukum dan Hierarki Norma Hukum Negara	32
D. Peraturan Perundang-Undangan	38
E. Landasan Teori	47

BAB III METODE PENELITIAN..... 51

A. Sifat Penelitian.....	51
B. Jenis Penelitian	52
C. Cara dan Alat Pengumpulan Data.....	52
D. Analisis Data.....	54
E. Bahan atau Materi Penelitian.....	56
F. Jalannya Penelitian	60

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 62

A. Kedudukan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sebagai Sumber Hukum Dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan	62
---	----



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

TINJAUAN TERHADAP KEDUDUKAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM
HIERARKI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA
BRIYAND SARAGIH, Dr. Mahaarum Kusuma Pertiwi, S.H., M.A., M.Phil.
Universitas Gadjah Mada, 2023 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

B. Faktor Yang Mendasari Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Kembali Dicantumkan Dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011	87
BAB V PENUTUP	134
A. Kesimpulan	134
B. Saran	136
Daftar Pustaka	